



# **RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020**

**DINAS PEREMPUAN DAN ANAK  
PROVINSI JAWA TENGAH**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

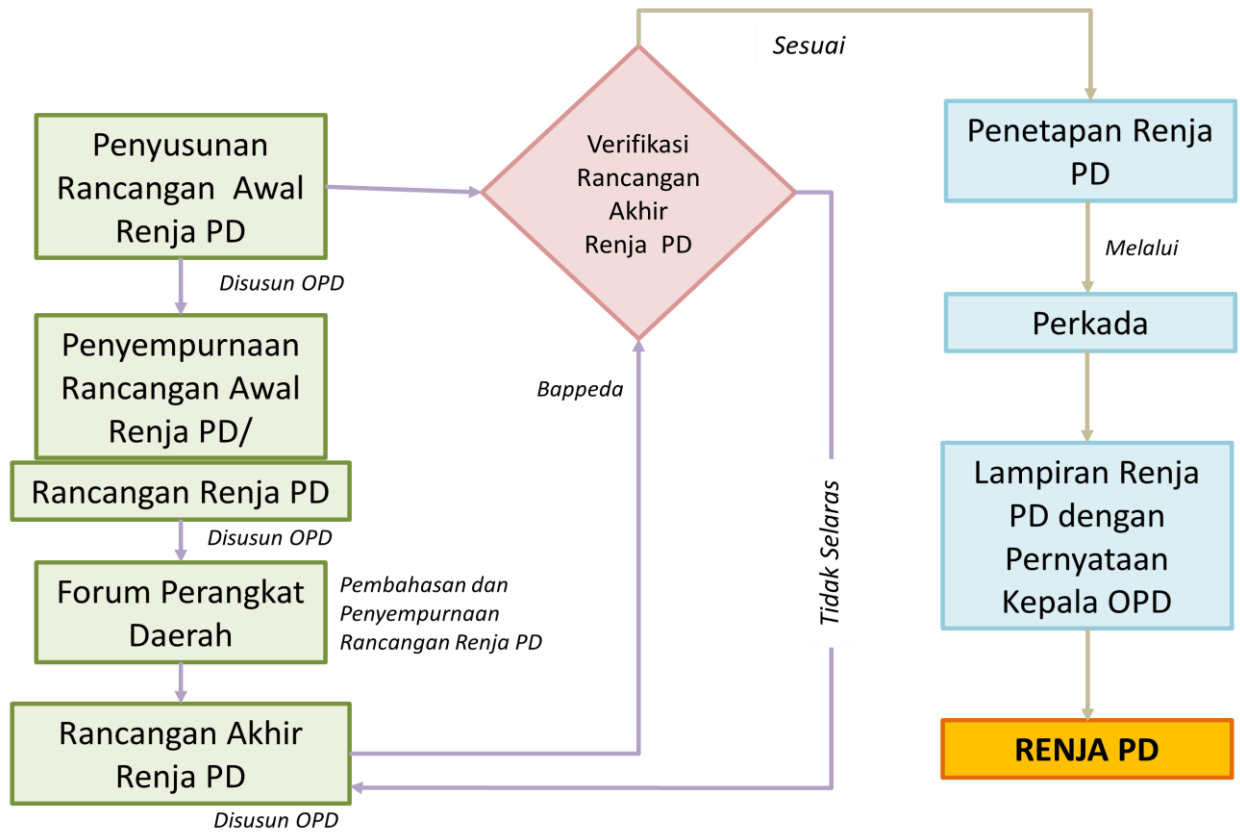
### **1.1. Latar Belakang**

Rencana kerja OPD (Renja OPD) adalah sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah dan merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu kepada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan berdasarkan usulan program dan kegiatan dari masyarakat/stakeholder terkait.

Renja Perangkat Daerah disusun sebagai tindak lanjut Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renja Perangkat Daerah disusun untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD Provinsi Jawa Tengah pada tahun berkenaan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah melalui beberapa tahap yaitu Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah, pelaksanaan Forum OPD dan Penetapan Renja Perangkat Daerah, sebagaimana digambarkan pada bagan berikut :

## Bagan 1. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah



Sumber : Permendagri 86/2017 Diolah

Rancangan Awal RKPD menjadi acuan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja RKPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja Perangkat Daerah, selaras dengan Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah mengacu pada kebijakan pembangunan daerah dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2020 yang dituangkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

Selain hal tersebut, penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 disusun mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dituangkan di dalam Renstra Perangkat Daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.)
  13. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi

- Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
  21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
  22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20);
  23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Pelaksanaan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 52);
  24. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 53);
  25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 88);
  26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa

- Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  28. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
  29. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
  30. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
  31. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
  32. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 37);
  33. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 212/PER/B1/2015 tentang Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019;
  34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
35. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 76);
  36. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Pelaksanaan Keluarga Berencana (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 51);
  37. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 65);
  38. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 95 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 95);
  39. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023;
  40. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2018-2023;
  41. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD 2020).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 adalah memberikan arah dan pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dalam program dan kegiatan dalam

kurun waktu 1 (satu) tahun ke dalam rangka mewujudkan visi dan misi Provinsi Jawa Tengah.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi seluruh unsur pimpinan dan staf Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun.
2. Menjadi tolok ukur dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja pimpinan dan staf Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah selama satu tahun.
3. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan selama satu tahun.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 adalah:

##### **BAB I Pendahuluan**

Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

##### **BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

Berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta review terhadap Rancangan Awal RKPD.

##### **BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Berisi uraian ringkas tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan perangkat daerah.

##### **BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Berisi uraian ringkas tentang indikator kinerja dan kelompok sasaran pencapaian Renja Perangkat Daerah dan pendanaan indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

##### **BAB V Penutup**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Capaian Kinerja Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 dalam pelaksanaan urusan wajib non pelayanan dasar pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan wajib non pelayanan dasar pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018 Provinsi Jawa Tengah**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Lembar : .....

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target indikator	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu( Tahun 2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5		6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
<b>2</b>	<b>Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>											
<b>2</b>	<b>Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>											
<b>2</b>	<b>02</b>	<b>15</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase peningkatan perempuan yang mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi</li> <li>- Persentase kabupaten/kota menuju layak anak tingkat pratama, tingkat madya, dan tingkat nindya</li> <li>- Persentase data dan informasi PPPA yang tersedia</li> </ul>	<p align="center">30</p> <p align="center">91,43</p> <p align="center">100</p>	-	-	-	-	-	0	
									25	80	87,50	
									80	16,66	16,66	
									83,33			
2	02	15	001	Pemberdayaan Perempuan	1) Jumlah perempuan yang telah mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi	350	-	-	-	30	-	0
2	02	15	001		2) Jumlah perempuan yang mempunyai hak memilih dalam pemilu mendapatkan pengetahuan politik	43.500	-	-	-	20.700	8.600	19,77
2	02	15	002	Pelebagaan PUG dan Peningkatan Kualitas Keluarga	1) Jumlah Perangkat Daerah Provinsi dan	73	-	-	-	73	73	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target indikator	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu( Tahun 2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5		6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		yang Responsif Gender									
			kabupaten/kota yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)								
			2) Persentase keluarga yang berkonsultasi peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender terlayani	100	-	-	-	-	100	100	100
2	02	15	003	Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Responsif Hak Anak	1) Jumlah Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak Tingkat Pratama, Tingkat Madya dan Tingkat Nindya 2) Persentase keluarga yang berkonsultasi peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan hak anak terlayani	32 100	- -	- -	28 100	28 100	87,5 100
2	02	15	004	Peningkatan Partisipasi Anak	Jumlah Forum Anak provinsi dan kab/kota yang terlibat proses pembangunan	36	-	-	34	30	83,33
2	02	15	005	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Anak dan Keluarga	Jumlah lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan	5	-	-	5	15	300
					Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yang dikuatkan dan dikembangkan	20	-	-	20	-	-
					Jumlah Lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas	30	-	-	30	30	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target indikator	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu( Tahun 2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5		6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		keluarga										
2	02	15	00 6	Penyusunan data dan informasi PPA	Jumlah laporan data dan informasi PPA	6	-	-	-	5	1	16,66
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>16</b>		<b>Perlindungan Perempuan Dan Anak</b>	<b>Rasio korban kekerasan terhadap perempuan</b>	<b>5,64 per 100.000</b>	-	-	-	<b>5,87 per 100.000</b>	<b>1,39 per 100.000</b>	<b>405,75</b>
					<b>Rasio korban kekerasan terhadap anak</b>	<b>12,36 per 100.000</b>	-	-	-	<b>12,76 per 100.000</b>	<b>1,79 per 100.000</b>	<b>690,50</b>
2	02	16	00 1	Rasio korban kekerasan terhadap anak	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa	967	-	-	-	1.007	174	555,75
2	02	16	00 2	Pencegahan dan Pengurangan Risiko Kekerasan Terhadap Anak	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak	1.158	-	-	-	1198	193	600
2	02	16	00 3	Layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan yang melaporkan mendapat layanan sesuai standar	100	-	-	-	100	100	100
2	02	16	00 4	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan/pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	40	-	-	-	8	-	0
2	02	16	00 5	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/pelayanan terpadu anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	15	-	-	-	15	-	0
2	02	16	00 6	Layanan penanganan korban kekerasan terhadap anak serta	Persentase anak korban kekerasan yang melaporkan	100	-	-	-	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target indikator	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu( Tahun 2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5		6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Anak Berhadapan hukum (ABH)	mendapat layanan sesuai standar									
<b>2</b>		<b>Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>										
2	08	15	<b>Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana</b>	<b>Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki kebijakan pengendalian kuantitas penduduk</b>	<b>41,67</b>	-	-	-	<b>8,33</b>	-	<b>0</b>	
				<b>Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)</b>	<b>30,00</b>	-	-	-	<b>28,45</b>	<b>27,61</b>	<b>92,03</b>	
				<b>Unmetneed KB</b>	<b>10,75</b>	-	-	-	<b>12,75</b>	<b>13,45</b>	<b>79,93</b>	
				<b>Persentase organisasi masyarakat/mitra kerja dalam program KB tingkat daerah provinsi yang aktif</b>	<b>100</b>	-	-	-	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
2	08	15	001	Peningkatan kesertaan KB MKJP	Jumlah Peserta KB MKJP	1.443.023	-	-	-	1.346.822	1.324.662	91,80
2	08	15	002	Pemaduan Kebijakan Dan Pengintegrasian Pendidikan Kependudukan	Jumlah kebijakan pengendalian penduduk yang disusun	15	-	-	-	3	-	-
					Jumlah SLTA yang mendapat pengetahuan pengendalian penduduk	175	-	-	-	35	-	-
2	08	15	003	Pemetaan Pengendalian Penduduk	Jumlah dokumen informasi kependudukan dan KB tingkat provinsi	10	-	-	-	2	-	-
2	08	15	004	Penyediaan profil kependudukan dan KB	Jumlah dokumen data kependudukan dan KB tingkat provinsi yang dipublikasikan	5	-	-	-	1	-	-
2	08	15	005	Penggerakan dan Pengembangan KIE pengendalian penduduk dan	Jumlah PUS yang ingin anak ditunda dan tidak	701.746	-	-	-	832.303	879.562	79,78

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target indikator	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu( Tahun 2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5		6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	KB	ingin anak lagi, tidak berKB										
2	08	15	006	Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja dalam program KB	Jumlah ormas/mitra kerja yang ditingkatkan peran sertanya dalam program KB	20	-	-	-	20	-	0
<b>2</b>	<b>08</b>	<b>16</b>		<b>Keluarga Sejahtera</b>	<b>Persentase kelompok tribina yang aktif</b>	<b>96,30</b>	-	-	-	<b>96,61</b>	<b>93,36</b>	<b>96,95</b>
					<b>Persentase UPPKS yang aktif</b>	<b>90,20</b>	-	-	-	<b>89,75</b>	<b>84,13</b>	<b>93,27</b>
					Persentase ormas dan mitra kerja dalam pembangunan keluarga	-	-	-	-	20	-	0
2	08	16	002	Advokasi Ketahanan Keluarga	Jumlah kelompok Tribina yang aktif	26.779	-	-	-	26.723	25.633	95,72
2	08	16	003	Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Dalam Pembangunan Keluarga	Jumlah ormas/mitra kerja yang ditingkatkan peran sertanya dalam program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	10	-	-	-	2	-	0
2	08	16	004	Advokasi Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok UPPKS Yang aktif	15.456	-	-	-	15.379	13.418	86,81
<b>2</b>				<b>Non Urusan</b>		-	-	-	-	-	-	-
2	02			<b>Eks BAU</b>								
2	02	01		<b>Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah</b>	<b>90</b>	-	-	-	<b>90</b>	<b>23,69</b>	<b>26,32</b>
2	02	01	001	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	20	-	-	-	4	-	0
2	02	01	002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	60	-	-	-	12	3	5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target indikator	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu( Tahun 2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5		6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
2	02	01	003	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	60	-	-	-	-	12	3	5
2	02	01	004	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	60	-	-	-	-	12	3	5
2	02	01	005	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	60	-	-	-	-	12	3	5
2	02	01	006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	60	-	-	-	-	12	3	5
2	02	01	007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	60	-	-	-	-	12	3	5
2	02	01	008	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	60	-	-	-	-	12	3	5
2	02	01	009	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	60	-	-	-	-	12	3	5
2	02	01	010	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	60	-	-	-	-	12	3	5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target indikator	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu( Tahun 2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5		6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
2	02	01	01	1	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	50	-	-	-	10	6	60
2	02	01	01	3	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas terpenuhi	4	-	-	-	0	-	0
2	02	01	01	4	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan	500	-	-	-	100	92	92
2	02	01	01	5	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/S eminar	100	-	-	-	20	5	5
2	02	01	01	6	Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah	60	-	-	-	12	3	5
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>02</b>		<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD</b>	<b>100</b>	-	-	-	<b>100</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
2	02	02	00	1	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	6	-	-	-	2	1	16,66
2	02	02	00	2	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	5	-	-	-	1	-	0

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah berdasarkan indikator kinerja pada urusan wajib non pelayanan dasar pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan wajib non pelayanan dasar pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>A</b>	<b>Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>											
1	Persentase peningkatan perempuan yang mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi			25	30	-	-	-				
2	Persentase kabupaten/kota menuju layak anak tingkat pratama, tingkat madya, dan tingkat nindya			80	82,86	-	-	80 (tw I)				
3	Persentase data dan informasi PPPA yang tersedia			83,33	83,33	-	-	16,66 (tw I)				
4	Jumlah perempuan yang telah mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi			30	80	-	-	-				
5	Jumlah perempuan yang mempunyai hak memilih dalam pemilu mendapatkan pengetahuan politik			20.700	5.700	-	-	8.600 (tw I)				
6	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)			73	73	-	-	73 (tw I)				
7	Persentase keluarga yang berkonsultasi peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender terlayani			100	100	-	-	100 (tw I)				
8	Jumlah Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak Tingkat Pratama, Tingkat Madya dan Tingkat Nindya			28	29	-	-	28 (tw I)				
9	Persentase keluarga yang berkonsultasi peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan hak anak terlayani			100	100	-	-	100 (tw I)				
10	Jumlah Forum Anak provinsi dan kab/kota yang terlibat proses pembangunan			34	34	-	-	30 (tw I)				
11	Jumlah lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan			5	5	-	-	15 (tw I)				
12	Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yang dikuatkan dan dikembangkan			20	20	-	-	0 (tw I)				
13	Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas keluarga yang dikuatkan dan dikembangkan			30	30	-	-	30 (tw I)				
14	Jumlah laporan data dan informasi PPA			5	5	-	-	1 (tw I)				
15	Rasio korban kekerasan terhadap perempuan			5,87	5,81	-	-	1,39 (tw I)				
16	Rasio korban kekerasan terhadap anak			12,76	12,66	-	-	1,79 (tw I)				
17	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa			1.007	997	-	-	174 (tw I)				
18	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak			1.198	1.188	-	-	193 (tw I)				
19	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan sesuai standar			100	100	-	-	100 (tw I)				

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
20	Jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan/pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya			8	8	-	-	0 (tw I)				
21	Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/pelayanan terpadu anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya			15	15	-	-	0 (tw I)				
22	Persentase anak korban kekerasan yang melaporkan mendapat layanan sesuai standar			100	100	-	-	100 (tw 1)				
	<b>URUSAN DALDUK KB</b>					-	-					
23	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki kebijakan pengendalian kuantitas penduduk			8,33	16,67	-	-	0 (tw I)				
24	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)			28	28,50	-	-	27,61 (tw I)				
25	Unmetneed KB			12,75	12,25	-	-	13,45 (tw I)				
26	Persentase organisasi masyarakat/mitra kerja dalam program KB tingkat daerah provinsi yang aktif			100	100	-	-	100 (tw I)				
27	Jumlah Peserta KB MKJP			1.346.822	1.370.872	-	-	1.324.662 (tw I)				
28	Jumlah kebijakan pengendalian penduduk yang disusun			3	3	-	-	0 (tw I)				
29	Jumlah SLTA yang mendapat pengetahuan pengendalian penduduk			35	35	-	-	0 (tw I)				
30	Jumlah dokumen informasi kependudukan dan KB tingkat provinsi			2	2	-	-	0 (tw I)				
31	Jumlah dokumen data kependudukan dan KB tingkat provinsi yang dipublikasikan			1	1	-	-	0 (tw I)				
32	Jumlah PUS yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, tidak berKB			832.303	799.664	-	-	879.562 (tw I)				
33	Jumlah ormas/mitra kerja yang ditingkatkan peran sertanya dalam program KB			20	20	-	-	0 (tw I)				
34	Persentase kelompok tribina yang aktif			96,10	96,15	-	-	93,36 (tw I)				
35	Persentase UPPKS yang aktif			87,73	89,75	-	-	84,13 (tw I)				
36	Persentase ormas dan mitra kerja dalam pembangunan keluarga			20	40	-	-	0 (tw I)				

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
37	Jumlah kelompok Tribina yang aktif			26.723	26.737	-	-	25.633 (tw I)				
38	Jumlah ormas/mitra kerja yang ditingkatkan peran sertanya dalam program ketahanan dan kesejahteraan keluarga			2	2	-	-	0 (tw I)				
39	Jumlah Kelompok UPPKS Yang aktif			15379	15.404	-	-	13.418 (tw I)				
	<b>EKS BAU</b>											
40	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah			90	90	-	-	23,69 (tw I)				
41	Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)			4	4	-	-	0 (tw I)				
42	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah			12	12	-	-	3 (tw I)				
43	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah			12	12	-	-	3 (tw I)				
44	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah			12	12	-	-	3 (tw I)				
45	Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah			12	12	-	-	3 (tw I)				
46	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah			12	12	-	-	3 (tw I)				
47	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah			12	12	-	-	3 (tw I)				
48	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah			12	12	-	-	3 (tw I)				
49	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah			12	12	-	-	3 (tw I)				
50	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah			12	12	-	-	3 (tw I)				
51	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah			10	10	-	-	6 (tw I)				
52	Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan			100	100	-	-	92 (tw I)				
53	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar			20	20	-	-	5 (tw I)				
54	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah			12	12	-	-	3 (tw I)				
55	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD			100	100	-	-	30 (tw I)				
56	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun			2	1	-	-	1 (tw I)				
57	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah			1	1	-	-	0 (tw I)				

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Koordinasi dan sinergi program dan kegiatan antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana berjalan dengan baik. Usulan kebutuhan kegiatan teknis di kabupaten/kota telah ditampung dan menjadi bahan penyusunan program kegiatan di tingkat provinsi. Kegiatan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota menjadi kegiatan yang harus dilaksanakan di masing-masing kabupaten/kota dengan tetap bersinergi pada capaian target indikator kinerja di tingkat provinsi dan indikator kinerja di tingkat kabupaten/kota sendiri. Sinergi tersebut dimulai dari keselarasan indikator kinerja pada dokumen perencanaan perangkat daerah dan implementasi kegiatan yang integratif.

Koordinasi dan sinergi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah dilakukan melalui penyelarasan penyusunan dokumen Renstra antara Renstra Kementerian dengan Renstra Perangkat Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Penyelarasan tersebut diharapkan akan mampu memberikan sinergitas yang optimal antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan nasional.

Permasalahan dan hambatan internal yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah antara lain :

1. Terbatasnya jumlah SDM yang tersedia dari formasi yang dibutuhkan;
2. Belum optimalnya kompetensi SDM yang ada, yang masih perlu pengembangan;
3. Terbatasnya sarana prasarana yang tersedia dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsi.

Permasalahan dan hambatan tersebut tidak terlalu berdampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan terhadap capaian program nasional, dikarenakan ketersediaan SDM dan sarana prasarana yang ada dioptimalkan dengan sebaik-baiknya. Tantangan dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah antara lain :

1. Urusan Perempuan dan Perlindungan Anak :
  - a. Rendahnya ketertarikan perempuan menjadi calon legislatif;
  - b. Rendahnya akses ekonomi bagi perempuan;

- c. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak;
  - d. Kuatnya budaya patriarki di masyarakat yang menyebabkan sulit tercapainya kesetaraan dan keadilan gender di masyarakat dan keluarga;
  - e. Kelompok kerja PUG dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan di provinsi dan kabupaten/kota belum optimal;
  - f. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan perempuan dan anak dan pemenuhan hak anak;
  - g. Tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama pada kasus KDRT dan kekerasan seksual;
  - h. Terbatasnya pedoman pelaksanaan dan sedikitnya implementasi perencanaan dan penganggaran yang responsif anak di kabupaten/kota untuk mendukung pemenuhan indikator KLA;
  - i. Rendahnya partisipasi anak dalam pembangunan terutama pada keterlibatan anak dalam proses-proses pengambilan keputusan.
2. Urusan Penduduk dan Keluarga Berencana :
- a. Rendahnya penggunaan alat kontrasepsi MKJP;
  - b. Rasio PLKB dengan jumlah desa yang tidak proporsional;
  - c. Kurangnya kapasitas PPKBD dalam membantu tugas PLKB dan mendukung program KB secara komprehensif;
  - d. Terbatasnya dukungan anggaran sehingga peran KIE program KB kurang maksimal;
  - e. Belum adanya dokumen kebijakan pengendalian kuantitas penduduk yang lebih komprehensif;
  - f. Sarana prasarana yang ada di lapangan tidak proporsional dan memadai dengan tuntutan terhadap pelayanan KB;
  - g. Menurunnya peran aktif kelompok BKB dalam meningkatkan ketahanan keluarga;
  - h. Meningkatnya jumlah keluarga sejahtera I yang perlu segera diberdayakan ekonominya.

Sedangkan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah antara lain :

1. Urusan Perempuan dan Perlindungan Anak :
  - a. Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;

- b. Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak melalui KLA;
  - c. Adanya komitmen internasional yang mewajibkan setiap negara untuk melaksanakan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
  - d. Adanya kerjasama antar Provinsi (tujuh Provinsi dan sepuluh Provinsi MPU) dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta TPPO;
  - e. Tersedianya berbagai pedoman dan modul tentang PUG, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemenuhan hak anak;
  - f. Adanya dukungan dari berbagai lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;
  - g. Tersedianya pedoman pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
  - h. Adanya Nota Kesepakatan Gubernur Jawa Tengah dan Pimpinan Aparat Penegak Hukum tingkat Jawa Tengah serta Perjanjian Kerja Sama (MOU) antara Kepala OPD PPPA dan Aparat Penegak Hukum dan Peradi terkait akses keadilan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam sistem peradilan;
  - i. Telah terbentuknya Forum Anak tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta pengembangan tingkat kecamatan dan desa;
  - j. Telah adanya pedoman Desa/Kelurahan Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak;
  - k. Telah terbentuknya kelompok perlindungan anak desa berbasis masyarakat.
2. Urusan Penduduk dan Keluarga Berencana :
- a. Adanya Peraturan Perundang-undangan tingkat nasional dan Daerah yang mendukung program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga;
  - b. Komitmen yang tinggi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, RPJMN dan RPJMD dalam penurunan laju pertumbuhan penduduk;
  - c. Adanya dukungan dari Mitra Kerja (PKBI, TP PKK, TNI, POLRI, Lembaga/organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya) dalam pelaksanaan program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga;

d. Telah terbentuk Kampung KB di tiap kabupaten/kota.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan antara lain :

1. Kesenjangan gender

Rata-rata lama sekolah bagi perempuan masih dibawah rata-rata lama sekolah laki-laki sehingga perlu peningkatan akses pendidikan bagi perempuan. Demikian pula pengeluaran perkapita disesuaikan bagi perempuan masih jauh dari pengeluaran perkapita laki-laki.

2. Pemenuhan Hak Anak

Perolehan penghargaan Kabupaten/Kota Menuju Layak anak dari berbagai kategori sebagai wujud pemenuhan hak anak dalam pembangunan pada tahun 2018 sebanyak 29 kabupaten/kota atau 80% dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. 6 kabupaten/kota lainnya atau 20% perlu didorong pemenuhan indikator kabupaten/kota layak anak agar pemenuhan hak anak dapat dirasakan di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah.

3. Perlindungan Perempuan dan Anak dari Segala Bentuk Kekerasan

Korban kekerasan yang dilaporkan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2019 Triwulan I sebanyak 367 kasus Atau 174 kasus perempuan dewasa dan 193 kasus terhadap anak . Walaupun data pada Tahun 2019 Triwulan I masih rendah akan tetapi bisa saja kasus akan meningkat, sehingga perlu upaya keras untuk pencegahan dan penanganannya.

4. Kesertaan Keluarga Berencana

Kepesertaan KB Aktif tahun 2017 sebesar 76,89% mengalami penurunan di tahun 2018 sebesar 73,69% dan pada tahun 2017 atau menurun sebesar 3,29%. adapun pasangan usia subur yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi tetapi tidak ber-KB (unmet need) tahun 2017 sebesar 11,69% menurun di tahun 2018 sebesar 9,95% dan pada tahun 2018 turun menjadi sebesar 13,6%. Hal tersebut disebabkan oleh 1) Rendahnya kesadaran Pasangan Usia Subur/PUS untuk ber-KB (takut efek samping, keyakinan agama),

- 2) Jumlah PLKB yang semakin berkurang dikarenakan pensiun;
  - 3) Peran lembaga masyarakat dirasakan belum maksimal.
5. Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Keaktifan kelompok BKB tahun 2018 mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun 2017, pada tahun 2017 sebesar 91,85 sedangkan capaian tahun 2018 sebesar 95,97 namun demikian capaian tersebut masih dibawah dari target yang telah ditetapkan sebesar 96,50. Hal tersebut disebabkan adanya 1 kabupaten (Temanggung) yang data BKB-nya belum tervalidasi atau update data dan adanya 1 kota (surakarta) yang terkendala pada pemasukan data awal di aplikasi BKKBN

#### 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review atas Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah terhadap hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020**

No	Rancangan Awal					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Idikator Kinerja	Target Capaian	Pagiu Indiaktif	Program/Kegiatan	Lokasi	Idikator Kinerja	Target Capaian	Pagiu Indiaktif
1	Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	Semarang dan luar semarang	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	90%	6.387.997.000	Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	Semarang dan luar semarang	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	90%	5.071.702.000
2	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semarang dan luar semarang	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100%	950.000.000	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semarang dan luar semarang	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100%	650.375.000
3	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak	Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Persentase peningkatan perempuan yang mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi; Persentase data dan informasi PPPA yang tersedia	30%; 83,33%	10.094.000.000	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak	Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Persentase peningkatan perempuan yang mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi; Persentase data dan informasi PPPA yang tersedia	30%; 83,33%	7.216.475.000
4	Perlindungan Perempuan Dan Anak	Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Rasio korban kekerasan terhadap perempuan; Rasio korban kekerasan	5.81.Per 100.000; 12.66.Per 100.000	3.040.000.000	Perlindungan Perempuan Dan Anak	Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Rasio korban kekerasan terhadap perempuan; Rasio korban kekerasan	5.81.Per 100.000; 12.66.Per 100.000	2.751.438.000

			terhadap anak;					terhadap anak;		
5	Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana	Semarang dan luar Semarang	Unmetneed KB;	12.25	6.899.619.000	Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana	Semarang dan luar Semarang	Unmetneed KB;	12.25	6.174.363.000
6	Keluarga Sejahtera	Semarang dan luar Semarang	Persentase kelompok tribina yang aktif; Persentase ormas dan mitra kerja dalam; Persentase UPPKS yang aktif	96,15; 40; 89,90	1.738.880.000	Keluarga Sejahtera	Semarang dan luar Semarang	Persentase kelompok tribina yang aktif; Persentase ormas dan mitra kerja dalam; Persentase UPPKS yang aktif	96,15; 40; 89,90	1.165.647.000



## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/ kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah adalah sebagaimana tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020**  
**Provinsi Jawa Tengah**

Nama Perangkat Daerah : Dinas PPPA DALDUK KB Provinsi Jawa Tengah

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>URUSAN PPPA</b>					
<b>I</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak</b>				
1	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan	Sragen, Kebumen, Cilacap  35 Kab/Kota	- Jumlah perempuan yang telah mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi - Jumlah perempuan yang mempunyai hak memilih dalam pemilu mendapatkan pengetahuan politik	80 orang  5.700 orang	Sasaran : Prioritas Daerah miskin
2	Pelebagaan PUG dan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Responsif Gender	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	38 OPD Provinsi dan 35 kab/kota	
3	Kegiatan Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Responsif Hak Anak	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak Tingkat Pratama dan Tingkat Madya	29 Kab/Kota	
4	Peningkatan Partisipasi Anak	Provinsi Jawa Tengah dan Salatiga, Purbalingga, Blora, Kendal	Jumlah Forum Anak Provinsi dan Kab/Kota yang terlibat proses pembangunan	34 forum anak prov dan kab/kota	
5	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Masyarakat	Provinsi Jawa Tengah	- Jumlah lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan yang dikuatkan dan	5 lembaga perempuan	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Anak dan Keluarga	Provinsi Jawa Tengah	dikembangkan - Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yang dikuatkan dan dikembangkan	20 lembaga masyarakat	
		Provinsi Jawa Tengah	- Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas keluarga yang dikuatkan dan dikembangkan	30 lembaga masyarakat	
6	Kegiatan Layanan Kualitas Keluarga	Provinsi Jawa Tengah	Persentase keluarga dan anak yang berkonsultasi peningkatan kualitas keluarga terlayani	100	
7	Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi PPPA	Provinsi Jawa Tengah	- Jumlah dokumen Profil dan analisis data Gender dan Anak yang disusun	5 dokumen	
<b>II</b>	<b>Program Perlindungan Perempuan dan Anak</b>				
1	Kegiatan Pencegahan dan Advokasi Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	997 kasus	Pemberi saran: LRC KJHam
2	Kegiatan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Kekerasan Terhadap Anak	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak	1188 kasus	Pemberi saran: LRC KJHam
3	Layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta Anak Berhadapan hukum (ABH)	Provinsi Jawa Tengah	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang melaporkan mendapat layanan sesuai standar	100%	
4	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan/pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	8 lembaga	
5	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan Perlindungan Anak	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/pelayanan terpadu Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	15 Kelompok	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			(AMPK) yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya		
<b>URUSAN DALDUK KB</b>					
<b>III</b>	<b>Program Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana</b>				
1	Kegiatan Peningkatan kesertaan KB MKJP	35 Kab/Kota	Jumlah Peserta KB MKJP	1.370.872 Orang	Sasaran : Prioritas Daerah miskin
2	Kegiatan Pemaduan Kebijakan Dan Pengintegrasian Pendidikan Kependudukan	Provinsi Jawa Tengah	- Jumlah kebijakan pengendalian penduduk tingkat provinsi dan kab/kot yang disusun;  - Jumlah SLTA yang mendapat pengetahuan pengendalian penduduk	3 Kebijakan  35 SLTA	
3	Kegiatan Pemetaan Pengendalian Penduduk	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah dokumen informasi kependudukan dan KB tingkat provinsi	2 dok	Pemberi saran: Koalisi Kependudukan
4	Kegiatan Penyediaan profil kependudukan dan KB	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah dokumen data kependudukan dan KB tingkat provinsi yang dipublikasikan	1 dok	Pemberi saran: Koalisi Kependudukan
5	Kegiatan Penggerakan dan Pengembangan KIE pengendalian penduduk dan KB	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah PUS yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, tidak berKB	799.664 Orang	
6	Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja dalam program KB	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah ormas/mitra kerja yang ditingkatkan peran sertanya dalam program KB	20 kelompok	
<b>IV</b>	<b>Program Keluarga Sejahtera</b>				
1	Kegiatan Advokasi Ketahanan Keluarga	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah kelompok Tribina yang aktif	26.737 kelompok	
2	Advokasi Kesejahteraan Keluarga	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah kelompok UPPKS yang aktif	15.404 kelompok	Sasaran : Prioritas Daerah miskin
3	Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Dalam Pembangunan Keluarga	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah ormas/mitra kerja yang ditingkatkan peran sertanya dalam program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	2 ormas	



## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Arah kebijakan pembangunan nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 belum terbit dikarenakan Pemerintah Pusat masih menyusun Draft RPJMN Tahun 2020-2024 sehingga yang dijadikan pedoman adalah RKP 2019 dengan mengusung tema “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”, dengan prioritas nasional antara lain :

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
3. Peningkatan nilai tambah ekonomimelalui pertanian, industri, dan jasa produksi;
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air;
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagaimana Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah adalah untuk membantu Gubernur dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah, antara lain : perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, serta data dan partisipasi masyarakat.

Prioritas nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah tersebut yaitu prioritas nasional ke-1 “Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar”.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Mendasarkan pada isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah antara lain : 1) kesenjangan gender; 2) pemenuhan hak anak; 3) perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan; 4) kesertaan keluarga berencana; 5) ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga, tujuan Renja dirumuskan untuk :

1. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak;
2. Mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Guna mendukung pencapaian tujuan Renja tersebut, sasaran difokuskan pada :

1. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan dan hak anak;
2. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3. Meningkatnya kesertaan keluarga berencana;
4. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

**Tabel 3.1.**

**Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah (RKPD)  
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020  
dengan Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020**

No	TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020		TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD TAHUN 2020	
	TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	SASARAN
1	Misi 3 : Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran			
	Kemiskinan di Jawa Tengah yang semakin menurun secara merata	Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin terutama penduduk miskin pedesaan, dan kelompok rumah tangga desil terbawah  Persentase penduduk miskin pedesaan 12,65%	1. Mewujudkan keluarga kecil berkualitas	1. Meningkatnya kesertaan keluarga berencana

No	TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020		TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD TAHUN 2020	
	TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	SASARAN
				2. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga
2	Misi 4 : Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan			
	Sumberdaya manusia Jawa Tengah yang semakin berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender  Indeks Pembangunan Gender (IPG) 92,06	2. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak	1. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan dan pemenuhan hak anak  2. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah beserta indikatornya yang digunakan dalam upaya pencapaian sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut :

**Tabel 3.2.**

**Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN TAHUN 2020	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,14	1. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan dan hak anak	Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	34,21

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN TAHUN 2020	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2020
1	2	3	4	5	6	7
		2. Persentase Kabupaten/ Kota Menuju Layak Anak	85,71		Persentase Kabupaten/ Kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak	25,71
		3. Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	8,29 per 100.000	2. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	8,13 per 100.000
2	Mewujudkan keluarga kecil berkualitas	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR)	2,24	3. Meningkatkan kesertaan keluarga berencana	Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR	75,10
				4. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persentase keluarga pra sejahtera	21,14

### 3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan penjabaran tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian target indikator pembangunan daerah tahun 2020 dan sebagai bagian integral dalam rangka pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Telah tersusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan rumusan program dan kegiatan disusun guna mendukung capaian visi pembangunan daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 yaitu “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari; Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Misi yang dilaksanakan antara lain :

1. Misi ke - 3, yaitu Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, Misi ini bertujuan untuk : **1) kemiskinan di Jawa Tengah yang semakin menurun secara merata;** dan 2) stabilitas

ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan. Sasaran yang ingin dicapai adalah: **1) meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin terutama penduduk miskin pedesaan, dan kelompok rumah tangga desil terbawah;** 2) menurunnya pengangguran terbuka; 3) meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah disertai kesejahteraan petani, dan peran investasi terhadap ekonomi daerah;

2. Misi ke - 4, yaitu Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan; Misi ini bertujuan untuk : **1) mewujudkan sumberdaya manusia yang semakin berkualitas dan berdaya saing dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM);** dan 2) mewujudkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup Jawa Tengah yang lestari dan berkelanjutan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Sasaran yang ingin dicapai adalah: 1) meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas; 2) meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; **3) meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender;** 4) meningkatnya kualitas air, udara, serta tutupan lahan; dan 5) meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana

Rumusan program dan kegiatan tahun 2020 juga mempertimbangkan untuk mendukung pencapaian SDG's dengan indikator antara lain :

1. Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang;
2. Unmetneed KB;
3. Jumlah peserta KB MKJP;
4. Jumlah PUS yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, tidak ber kB;
5. Rasio korban kekerasan terhadap perempuan;
6. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan;
7. Rasio korban kekerasan terhadap anak;
8. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak;
9. Persentase peningkatan perempuan yang mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi;
10. Jumlah perangkat daerah Provinsi, Kab/Kota yang melaksanakan PPRG;

11. Persentase keluarga berkonsultasi peningkatan kualitas keluarga yang responsif gender terlayani.

Program dan kegiatan juga diarahkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan dalam prioritas pembangunan melalui penyediaan *basic life access* (klaster 1) dan penguatan *sustainable livelihood* (klaster 2 dan 3).

Pengembangan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan dengan pendayagunaan potensi ekonomi daerah/lokal setempat menjadi pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan utamanya untuk pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan kesetaraan gender di bidang ekonomi.

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 mencakup 6 program dan 39 kegiatan, yang terdiri 2 program guna mendukung urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (12 kegiatan), 2 program guna mendukung urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana (9 kegiatan), dan 2 program guna mendukung eks BAU non urusan (18 kegiatan).

Lokasi program dan kegiatan tersebar di kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan mempertimbangkan alokasi yang terlebih pada 14 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk miskin terbanyak dan kelompok sasaran kegiatan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi perangkat daerah.

Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirumuskan sebesar Rp 23.030.000.000,- dengan rincian pagu indikatif pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebesar Rp 9.967.913.000,-; pagu indikatif pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebesar Rp 7.340.010.000,-; dan pagu indikatif pada eks BAU non urusan sebesar Rp 5.722.077.000,-.

Program dan kegiatan Tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

**Tabel 3.3.**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019**  
**Dan Prakiraan Maju Tahun 2020**  
**Provinsi Jawa Tengah**

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Lembar ..... dari .....

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2020	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi
		Keluaran		Hasil		Rp.	Target	Rp. (000)	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	NON URUSAN								
0	NON URUSAN								
0.00.01	Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah					5.071.702.000		7.470.745	
0.00.01.001	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	4.00 Dokumen	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	90.00.%	314.500.000	4.00 Dokumen	417.450	OPD Provinsi; SEMARANG
0.00.01.002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	12.00 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	90.00.%	15.000.000	12.00 Bulan	35.000	OPD Provinsi; SEMARANG

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2020	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi
		Keluaran		Hasil		Rp.	Target	Rp. (000)	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.00.01.003	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	12.00 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	90.00.%	625.000.000	12.00 Bulan	900.000	OPD Provinsi
0.00.01.004	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	12.00 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	90.00.%	60.000.000	12.00 Bulan	160.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG
0.00.01.005	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12.00 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	90.00.%	1.000.000.000	12.00 Bulan	1.250.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG
0.00.01.006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12.00 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	90.00.%	481.000.000	12.00 Bulan	665.500	OPD Provinsi; DKI JAKARTA; SEMARANG

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2020	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi
		Keluaran		Hasil		Rp.	Target	Rp. (000)	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.00.01.007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12.00 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	90.00.00%	92.500.000	12.00 Bulan	160.000	OPD Provinsi; SEMARANG
0.00.01.008	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12.00 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	90.00.00%	12.000.000	12.00 Bulan	45.000	OPD Provinsi; SEMARANG
0.00.01.009	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	12.00 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	90.00.00%	730.000.000	12.00 Bulan	1.200.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2020	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi
		Keluaran		Hasil		Rp.	Target	Rp. (000)	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.00.01.010	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12.00 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	90.00.00%	241.702.000	12.00 Bulan	450.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG
0.00.01.011	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	10.00 Unit	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	90.00.00%	950.000.000	10.00 Unit	652.795	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG
0.00.01.013	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas terpenuhi	3.00 Unit	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	90.00.00%	80.000.000	1.00 Unit	850.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG
0.00.01.014	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan	100.00 Unit	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	90.00.00%	40.000.000	100.00 Unit	60.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG
0.00.01.015	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/	20.00 Orang	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan	90.00.00%	30.000.000	20.00 Orang	75.000	OPD Provinsi

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2020	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi
		Keluaran		Hasil		Rp.	Target	Rp. (000)	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Workshop/Bin tek/Seminar		keuangan perangkat daerah					
0.00.01.01 6	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah	3.00 Dokumen	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	90.00.%	200.000.000	3.00 Dokumen	300.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG
0.00.01.02 3	Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah	12.00 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	90.00.%	200.000.000	12.00 Bulan	250.000	OPD Provinsi
0.00.02	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					650.375.000		1.050.000	
0.00.02.00 1	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1.00 Dokumen	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100.00.%	470.000.000	1.00 Dokumen	550.000	OPD Provinsi; DKI JAKARTA; KOTA SALATIGA; KOTA SEMARANG
0.00.02.00 2	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	1.00 Dokumen	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100.00.%	180.375.000	1.00 Dokumen	500.000	OPD Provinsi; SEMARANG

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2020	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi
		Keluaran		Hasil		Rp.	Target	Rp. (000)	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>								
2.02	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>								
2.02.15	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak					7.216.475.000		10.844.000	
2.02.15.001	Pemberdayaan Perempuan	Jumlah perempuan yang telah mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi	80.00 Orang	Persentase peningkatan perempuan yang mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi	30.00.%	1.600.000.000	80.00 Orang	2.184.000	Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; Grobogan; Blora; Banjarnegara; Klaten; Sragen; Demak; Banyumas; Purbalingga
		Jumlah perempuan yang mempunyai hak memilih dalam pemilu mendapatkan pengetahuan politik	5700.00 Orang				1.700.000.000	5700.00 Orang	2.200.000

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2020	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi
		Keluaran		Hasil		Rp.	Target	Rp. (000)	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.02.15.00 2	Pelebagaan PUG dan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Responsif Gender	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	73.00 OPD	Persentase peningkatan perempuan yang mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi	30.00.00%	696.225.000	73.00 OPD	1.500.000	Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
		Persentase keluarga yang berkonsultasi peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender terlayani	100.00 %				128.775.000	100.00 %	175.000
2.02.15.00 3	Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Responsif Hak Anak	Jumlah Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak Tingkat Pratama, Tingkat Madya dan Tingkat Nindya	29.00 Kabupaten/Kota			750.000.000	30.00 Kabupaten/Kota	1.400.000	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak; Dki Jakarta; Kota Pekalongan; Rembang; Banyumas; Purworejo; Sragen; Wonosobo; Demak; Pemalang;

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2020	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi
		Keluaran		Hasil		Rp.	Target	Rp. (000)	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Karanganyar; Kota Semarang; Banjarnegara; Grobogan
		Persentase keluarga yang berkonsultasi peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan hak anak terlayani	100.00 %			113.025.000	100.00 %	175.000	
2.02.15.004	Peningkatan Partisipasi Anak	Jumlah Forum Anak provinsi dan kab/kota yang terlibat proses pembangunan	34.00 Lokasi			300.000.000	35.00 Lokasi	450.000	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak; Bali; Kota Semarang; Sragen; Brebes; Klaten
2.02.15.005	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Anak dan Keluarga	Jumlah lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan	5.00 Kelompok			1.125.000.000	5.00 Kelompok	1.350.000	Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat; Sragen; Rembang; Kota Salatiga; Kota Semarang; Sukoharjo; Jepara

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2020	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi
		Keluaran		Hasil		Rp.	Target	Rp. (000)	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yang dikuatkan dan dikembangkan	20.00 Kelompok			100.000.000	20.00 Kelompok	150.000	
		Jumlah Lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas keluarga	30.00 Kelompok			80.000.000	30.00 Kelompok	160.000	
2.02.15.006	Penyusunan data dan informasi PPA	Jumlah laporan data dan informasi PPA	5.00 Dokumen	Persentase data dan informasi PPPA yang tersedia	83.33.%	623.450.000	6.00 Dokumen	1.100.000	Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat
2.02.16	Perlindungan Perempuan Dan Anak					2.751.438.000		3.344.000	
2.02.16.001	Pencegahan dan Advokasi Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa	997.00 Kasus	Rasio korban kekerasan terhadap perempuan	5.81.Per 100.000	1.100.000.000	987.00 Kasus	1.150.000	Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2020	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi
		Keluaran		Hasil		Rp.	Target	Rp. (000)	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.02.16.00 2	Pencegahan dan Pengurangan Risiko Kekerasan Terhadap Anak	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak	1188.00 Kasus	Rasio korban kekerasan terhadap anak	12.66.Per 100.000	617.163.000	1178.00 Kasus	899.000	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak; Banjarnegara; Purbalingga; Kebumen; Klaten; Purworejo; Grobogan; Sragen; Brebes; Wonosobo; Banyumas; Blora; Pemalang; Rembang; Demak
2.02.16.00 3	Layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan yang melaporkan mendapat layanan sesuai standar	100.00 %	Rasio korban kekerasan terhadap perempuan	5.81.Per 100.000	230.000.000	100.00 %	275.000	Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
2.02.16.00 4	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan/peleayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan yang	8.00 Kelompok	Rasio korban kekerasan terhadap perempuan	5.81.Per 100.000	370.000.000	8.00 Kelompok	450.000	Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2020	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi
		Keluaran		Hasil		Rp.	Target	Rp. (000)	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		difasilitasi penguatan dan pengembangannya							
2.02.16.005	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/pelayanan terpadu anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	15.00 Kelompok	Rasio korban kekerasan terhadap anak	12.66.Per 100.000	80.000.000	15.00 Kelompok	160.000	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
2.02.16.006	Layanan penanganan korban kekerasan terhadap anak serta Anak Berhadapan hukum (ABH)	Persentase anak korban kekerasan yang melaporkan mendapat layanan sesuai standar	100.00 %	Rasio korban kekerasan terhadap anak	12.66.Per 100.000	354.275.000	100.00 %	410.000	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak; Sragen; Klaten; Kota Semarang; Banjarnegara; Demak; Magelang; Brebes; Cilacap; Kota Magelang; Wonosobo; Sukoharjo; Batang; Karanganyar;

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2020	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi
		Keluaran		Hasil		Rp.	Target	Rp. (000)	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Kendal; Semarang; Pekalongan; Blora; Rembang; Jepara; Kudus; Purbalingga; Pati; Kebumen; Wonogiri; Kota Pekalongan; Temanggung; Kota Salatiga; Purworejo; Kota Tegal; Kota Surakarta; Grobogan; Banyumas; Pemalang; Tegal; Boyolali
<b>2.08</b>	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB</b>								
2.08.15	Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana					6.174.363.000		7.649.619	
2.08.15.001	Peningkatan kesertaan KB MKJP	Jumlah Peserta KB MKJP	1370872.00 Orang			3.550.000.000	1394922.00 Orang	4.549.619	Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE; Rembang; Pekalongan; Kudus; Purbalingga; Cilacap; Banjarnegara;

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2020	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi
		Keluaran		Hasil		Rp.	Target	Rp. (000)	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Sukoharjo; Karanganyar; Kebumen; Jepara; Batang; Wonosobo; Boyolali; Pati; Wonogiri; Sragen; Kota Pekalongan; Grobogan; Pemalang; Kota Surakarta; Kota Salatiga; Purworejo; Tegal; Blora; Demak; Kendal; Semarang; Kota Semarang; Klaten; Magelang; Kota Tegal; Temanggung; Banyumas; Brebes
2.08.15.00 2	Pemaduan Kebijakan Dan Pengintegrasian Pendidikan Kependudukan	Jumlah kebijakan pengendalian penduduk yang disusun	3.00 Dokumen			441.040.000	3.00 Dokumen	550.000	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
		Jumlah SLTA yang mendapat pengetahuan pengendalian penduduk	35.00 Lokasi			196.840.000	35.00 Lokasi	225.000	
2.08.15.00 3	Pemetaan Pengendalian Penduduk	Jumlah dokumen informasi	2.00 Dokumen			189.625.000	2.00 Dokumen	275.000	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2020	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi
		Keluaran		Hasil		Rp.	Target	Rp. (000)	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		kependudukan dan KB tingkat provinsi							
2.08.15.004	Penyediaan profil kependudukan dan KB	Jumlah dokumen data kependudukan dan KB tingkat provinsi yang dipublikasikan	1.00 Dokumen			30.000.000	1.00 Dokumen	60.000	Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat
2.08.15.005	Penggerakan dan Pengembangan KIE pengendalian penduduk dan KB	Jumlah PUS yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, tidak berKB	799.664 Orang	Unmetneed KB	12.25.%	1.678.428.000	767025.00 Orang	1.850.000	Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE; Kudus; Tegal; Kota Tegal; Kota Surakarta; Kota Salatiga; Karanganyar; Kota Pekalongan; Kota Magelang; Blora; Temanggung; Wonosobo; Kota Semarang; Purbalingga; Brebes; Boyolali; Batang; Rembang; Banyumas; Sragen; Klaten
2.08.15.006	Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra	Jumlah ormas/mitra kerja yang	20.00 Kelompok			88.430.000	20.00 Kelompok	140.000	Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat; Kota

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2020	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi
		Keluaran		Hasil		Rp.	Target	Rp. (000)	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kerja dalam program KB	ditingkatkan peran sertanya dalam program KB							Salatiga; Kota Magelang; Kota Surakarta
2.08.16	Keluarga Sejahtera					1.165.647.000		1.912.769	
2.08.16.00 2	Advokasi Ketahanan Keluarga	Jumlah kelompok Tribina yang aktif	26737.00 Kelompok	Persentase kelompok tribina yang aktif	96.15.%	761.507.000	26751.00 Kelompok	945.000	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
2.08.16.00 3	Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Dalam Pembangunan Keluarga	Jumlah ormas/mitra kerja yang ditingkatkan peran sertanya dalam program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	4.00 Kelompok	Persentase ormas dan mitra kerja dalam pembangunan keluarga	40.00.%	104.140.000	6.00 Kelompok	180.000	Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat; sragen; kota semarang
2.08.16.00 4	Advokasi Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok UPPKS Yang aktif	15404.00 Kelompok	Persentase UPPKS yang aktif	89.90.%	300.000.000	15422.00 Kelompok	787.769	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
<b>Total</b>						<b>23.030.000.000</b>		<b>32.271.133</b>	

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 terdiri dari rencana program dan kegiatan perangkat daerah beserta pendanaan yang menunjang pencapaian visi dan misi pembangunan Jawa Tengah sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah dengan memperhatikan program prioritas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 selama satu tahun mendatang yang dituangkan dalam Rencana Program dan Kegiatan sesuai dengan RKPD Tahun 2020 yang menyebutkan

**a. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak**

Kegiatan diarahkan pada pemberdayaan perempuan; pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) serta tingkat kualitas keluarga yang responsif gender dan anak; peningkatan partisipasi anak; penguatan dan pengembangan lembaga masyarakat untuk meningkatkan kualitas perempuan dan anak serta keluarga; dan penyusunan data dan informasi PPPA. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase peningkatan perempuan yang mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi sebesar 30%; persentase data dan informasi PPPA yang tersediasebesar 83,33%; dan persentase kabupaten/kota menuju layak anak tingkat pratama, tingkat madya, dan tingkat nindya sebesar 82,26%.

**b. Program Perlindungan Perempuan dan Anak**

Kegiatan diarahkan pada pencegahan dan advokasi penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak; layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta ABH; penguatan dan pengembangan lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator penurunan rasio korban kekerasan terhadap perempuan sebesar 5,81 per 100.000; dan rasio korban kekerasan terhadap anak sebesar 12,66 per 100.000.

**c. Program Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana**

Kegiatan diarahkan pada peningkatan kesertaan KB MKJP; pencanangan dan pemantapan Kampung KB; penyusunan kebijakan pembangunan kualitas kependudukan; pengintegrasian pendidikan kependudukan; pemetaan pengendalian penduduk; penyusunan profil kependudukan dan KB; penggerakan dan pengembangan KIE pengendalian penduduk dan KB; peningkatan peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam program

KB. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) sebesar 28,50%; persentase organisasi masyarakat/mitra kerja dalam program KB tingkat daerah provinsi yang aktif sebesar 100%; persentase provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki kebijakan pengendalian kuantitas penduduk sebesar 16,67%; serta penurunan *Unmetneed* KB sebesar 12,25%.

**d. Program Keluarga Sejahtera**

Kegiatan diarahkan pada advokasi ketahanan keluarga di 35 kabupaten/kota; peningkatan peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam pembangunan keluarga dan advokasi kesejahteraan keluarga. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase kelompok tribina yang aktif sebesar 96,15%; persentase UPPKS yang aktif sebesar 89,90%; dan persentase ormas dan mitra kerja dalam pembangunan keluarga sebesar 40%.

- c.** Adapun Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif, sebagaimana pada Tabel 4.1 adapun Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan:

**Tabel 4.1**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA**  
**BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020**

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2020	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi
		Keluaran		Hasil		Rp.	Target	Rp. (000)	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	NON URUSAN								
0	NON URUSAN								
0.00.01	Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah					5.071.702.000		7.470.745	
0.00.01.001	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	4.00 Dokumen	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	90.00.00%	314.500.000	4.00 Dokumen	417.450	OPD Provinsi; SEMARANG
0.00.01.002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat	12.00 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	90.00.00%	15.000.000	12.00 Bulan	35.000	OPD Provinsi; SEMARANG

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2020	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi
		Keluaran		Hasil		Rp.	Target	Rp. (000)	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Daerah							
0.00.01.003	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	12.00 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	90.00.00%	625.000.000	12.00 Bulan	900.000	OPD Provinsi
0.00.01.004	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	12.00 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	90.00.00%	60.000.000	12.00 Bulan	160.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG
0.00.01.005	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12.00 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	90.00.00%	1.000.000.000	12.00 Bulan	1.250.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG
0.00.01.006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-	12.00 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	90.00.00%	481.000.000	12.00 Bulan	665.500	OPD Provinsi; DKI JAKARTA; SEMARANG

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2020	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi
		Keluaran		Hasil		Rp.	Target	Rp. (000)	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah							
0.00.01.007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12.00 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	90.00.%	92.500.000	12.00 Bulan	160.000	OPD Provinsi; SEMARANG
0.00.01.008	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12.00 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	90.00.%	12.000.000	12.00 Bulan	45.000	OPD Provinsi; SEMARANG
0.00.01.009	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah	12.00 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	90.00.%	730.000.000	12.00 Bulan	1.200.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2020	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi
		Keluaran		Hasil		Rp.	Target	Rp. (000)	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Dinas/ Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/ Operasional Perangkat Daerah							
0.00.01.010	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12.00 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	90.00.00%	241.702.000	12.00 Bulan	450.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG
0.00.01.011	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	10.00 Unit	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	90.00.00%	950.000.000	10.00 Unit	652.795	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG
0.00.01.013	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas terpenuhi	3.00 Unit	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	90.00.00%	80.000.000	1.00 Unit	850.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2020	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi
		Keluaran		Hasil		Rp.	Target	Rp. (000)	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.00.01.014	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan	100.00 Unit	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	90.00.%	40.000.000	100.00 Unit	60.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG
0.00.01.015	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar	20.00 Orang	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	90.00.%	30.000.000	20.00 Orang	75.000	OPD Provinsi
0.00.01.016	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah	3.00 Dokumen	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	90.00.%	200.000.000	3.00 Dokumen	300.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG
0.00.01.023	Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah	12.00 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	90.00.%	200.000.000	12.00 Bulan	250.000	OPD Provinsi
0.00.02	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					650.375.000		1.050.000	
0.00.02.001	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	1.00 Dokumen	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100.00.%	470.000.000	1.00 Dokumen	550.000	OPD Provinsi; DKI JAKARTA; KOTA SALATIGA; KOTA SEMARANG

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2020	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi
		Keluaran		Hasil		Rp.	Target	Rp. (000)	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		yang disusun							
0.00.02.002	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	1.00 Dokumen	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100.00.00%	180.375.000	1.00 Dokumen	500.000	OPD Provinsi; SEMARANG
<b>2</b>	<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>								
<b>2.02</b>	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>								
2.02.15	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak					7.216.475.000		10.844.000	
2.02.15.001	Pemberdayaan Perempuan	Jumlah perempuan yang telah mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi	80.00 Orang	Persentase peningkatan perempuan yang mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi	30.00.00%	1.600.000.000	80.00 Orang	2.184.000	Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; GROBOGAN; BLORA; BANJARNEGARA; KLATEN; SRAGEN; DEMAK; BANYUMAS; PURBALINGGA
		Jumlah perempuan yang mempunyai hak	5700.00 Orang			1.700.000.000	5700.00 Orang	2.200.000	

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2020	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi
		Keluaran		Hasil		Rp.	Target	Rp. (000)	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		memilih dalam pemilu mendapatkan pengetahuan politik							
2.02.15.002	Pelebagaan PUG dan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Responsif Gender	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi dan kabupaten /kota yang melaksanakan Perencanaaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	73.00 OPD	Persentase peningkatan perempuan yang mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi	30.00.0%	696.225.000	73.00 OPD	1.500.000	Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
		Persentase keluarga yang berkonsultasi peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender terlayani	100.00 %			128.775.000	100.00 %	175.000	

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2020	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi
		Keluaran		Hasil		Rp.	Target	Rp. (000)	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.02.15.003	Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Responsif Hak Anak	Jumlah Kabupaten /Kota Menuju Layak Anak Tingkat Pratama, Tingkat Madya dan Tingkat Nindya	29.00 Kabupaten/Kota			750.000.000	30.00 Kabupaten/Kota	1.400.000	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak; Dki Jakarta; Kota Pekalongan; Rembang; Banyumas; Purworejo; Sragen; Wonosobo; Demak; Pemalang; Karanganyar; Kota Semarang; Banjarnegara; Grobogan
		Persentase keluarga yang berkonsultasi peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan hak anak terlayani	100.00 %			113.025.000	100.00 %	175.000	
2.02.15.004	Peningkatan Partisipasi Anak	Jumlah Forum Anak provinsi dan kab/kota yang terlibat proses pembangunan	34.00 Lokasi			300.000.000	35.00 Lokasi	450.000	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak; BALI; KOTA SEMARANG; SRAGEN; BREBES; KLATEN

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2020	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi
		Keluaran		Hasil		Rp.	Target	Rp. (000)	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.02.15.005	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Anak dan Keluarga	Jumlah lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan	5.00 Kelompok			1.125.000.000	5.00 Kelompok	1.350.000	Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat; SRAGEN; REMBANG; KOTA SALATIGA; KOTA SEMARANG; SUKOHARJO; JEPARA
		Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yang dikuatkan dan dikembangkan	20.00 Kelompok			100.000.000	20.00 Kelompok	150.000	
		Jumlah Lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas keluarga	30.00 Kelompok			80.000.000	30.00 Kelompok	160.000	
2.02.15.006	Penyusunan data dan informasi PPA	Jumlah laporan data dan informasi PPA	5.00 Dokumen	Persentase data dan informasi PPPA yang tersedia	83.33.%	623.450.000	6.00 Dokumen	1.100.000	Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2020	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi
		Keluaran		Hasil		Rp.	Target	Rp. (000)	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.02.16	Perlindungan Perempuan Dan Anak					2.751.438.000		3.344.000	
2.02.16.00 1	Pencegahan dan Advokasi Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa	997.00 Kasus	Rasio korban kekerasan terhadap perempuan	5.81.Per 100.000	1.100.000.000	987.00 Kasus	1.150.000	Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
2.02.16.00 2	Pencegahan dan Pengurangan Risiko Kekerasan Terhadap Anak	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak	1188.00 Kasus	Rasio korban kekerasan terhadap anak	12.66.Per 100.000	617.163.000	1178.00 Kasus	899.000	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak; Banjarnegara; Purbalingga; Kebumen; Klaten; Purworejo; Grobogan; Sragen; Brebes; Wonosobo; Banyumas; Blora; Pemalang; Rembang; Demak
2.02.16.00 3	Layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan yang melaporkan mendapat layanan sesuai standar	100.00 %	Rasio korban kekerasan terhadap perempuan	5.81.Per 100.000	230.000.000	100.00 %	275.000	Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
2.02.16.00 4	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan	8.00 Kelompok	Rasio korban kekerasan terhadap perempuan	5.81.Per 100.000	370.000.000	8.00 Kelompok	450.000	Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2020	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi
		Keluaran		Hasil		Rp.	Target	Rp. (000)	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		/pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya							
2.02.16.005	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/pelayanan terpadu anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	15.00 Kelompok	Rasio korban kekerasan terhadap anak	12.66.Per 100.000	80.000.000	15.00 Kelompok	160.000	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
2.02.16.006	Layanan penanganan korban kekerasan terhadap anak serta Anak Berhadapan hukum (ABH)	Persentase anak korban kekerasan yang melaporkan mendapat	100.00 %	Rasio korban kekerasan terhadap anak	12.66.Per 100.000	354.275.000	100.00 %	410.000	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak; Sragen; Klaten; Kota Semarang; Banjarnegara; Demak; Magelang;

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2020	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi
		Keluaran		Hasil		Rp.	Target	Rp. (000)	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		layanan sesuai standar							Brebes; Cilacap; Kota Magelang; Wonosobo; Sukoharjo; Batang; Karanganyar; Kendal; Semarang; Pekalongan; Blora; Rembang; Jepara; Kudus; Purbalingga; Pati; Kebumen; Wonogiri; Kota Pekalongan; Temanggung; Kota Salatiga; Purworejo; Kota Tegal; Kota Surakarta; Grobogan; Banyumas; Pemalang; Tegal; Boyolali
<b>2.08</b>	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB</b>								
2.08.15	Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana					6.174.363.000		7.649.619	
2.08.15.001	Peningkatan kesertaan KB MKJP	Jumlah Peserta KB MKJP	1370872.00 Orang			3.550.000.000	1394922.00 Orang	4.549.619	Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE; Rembang; Pekalongan; Kudus; Purbalingga; Cilacap; Banjarnegara;

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2020	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi
		Keluaran		Hasil		Rp.	Target	Rp. (000)	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Sukoharjo; Karanganyar; Kebumen; Jepara; Batang; Wonosobo; Boyolali; Pati; Wonogiri; Sragen; Kota Pekalongan; Grobogan; Pemalang; Kota Surakarta; Kota Salatiga; Purworejo; Tegal; Blora; Demak; Kendal; Semarang; Kota Semarang; Klaten; Magelang; Kota Tegal; Temanggung; Banyumas; Brebes
2.08.15.00 2	Pemaduan Kebijakan Dan Pengintegrasian Pendidikan Kependudukan	Jumlah kebijakan pengendalian penduduk yang disusun	3.00 Dokumen			441.040.000	3.00 Dokumen	550.000	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
		Jumlah SLTA yang mendapatkan pengetahuan pengendalian penduduk	35.00 Lokasi			196.840.000	35.00 Lokasi	225.000	
2.08.15.00 3	Pemetaan Pengendalian Penduduk	Jumlah dokumen informasi kependudukan dan KB tingkat	2.00 Dokumen			189.625.000	2.00 Dokumen	275.000	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2020	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi
		Keluaran		Hasil		Rp.	Target	Rp. (000)	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		provinsi							
2.08.15.004	Penyediaan profil kependudukan dan KB	Jumlah dokumen data kependudukan dan KB tingkat provinsi yang dipublikasikan	1.00 Dokumen			30.000.000	1.00 Dokumen	60.000	Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat
2.08.15.005	Penggerakan dan Pengembangan KIE pengendalian penduduk dan KB	Jumlah PUS yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, tidak berKB	799.664 Orang	Unmetneed KB	12.25.%	1.678.428.000	767.025 Orang	1.850.000	Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE; Kudus; Tegal; Kota Tegal; Kota Surakarta; Kota Salatiga; Karanganyar; Kota Pekalongan; Kota Magelang; Blora; Temanggung; Wonosobo; Kota Semarang; Purbalingga; Brebes; Boyolali; Batang; Rembang; Banyumas; Sragen; Klaten
2.08.15.006	Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja dalam program KB	Jumlah ormas/mitra kerja yang ditingkatkan peran sertanya	20 Kelompok			88.430.000	20 Kelompok	140.000	Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat; Kota Salatiga; Kota Magelang; Kota Surakarta

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2020	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi
		Keluaran		Hasil		Rp.	Target	Rp. (000)	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		dalam program KB							
2.08.16	Keluarga Sejahtera					1.165.647.000		1.912.769	
2.08.16.002	Advokasi Ketahanan Keluarga	Jumlah kelompok Tribina yang aktif	26.737 Kelompok	Persentase kelompok tribina yang aktif	96.15.%	761.507.000	26.751 Kelompok	945.000	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
2.08.16.003	Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Dalam Pembangunan Keluarga	Jumlah ormas/mitra kerja yang ditingkatkan peran sertanya dalam program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	4.00 Kelompok	Persentase ormas dan mitra kerja dalam pembangunan keluarga	40.00.%	104.140.000	6.00 Kelompok	180.000	Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat; Sragen; Kota Semarang
2.08.16.004	Advokasi Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok UPPKS Yang aktif	15.404 Kelompok	Persentase UPPKS yang aktif	89.90.%	300.000.000	15.422 Kelompok	787.769	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
<b>Total</b>						<b>23.030.000.000</b>		<b>32.271.133</b>	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 merupakan penjabaran dalam mewujudkan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka pendek melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah serta dalam pelaksanaan Renja. Selain itu, Renja sebagai alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan atas kinerja tahunan.

Penyusunan Renja dilakukan melalui proses panjang mulai dari persiapan penyusunan Renja, penyusunan Rancangan Renja, Penyempurnaan Rancangan Renja telah melibatkan penjaringan aspirasi dan identifikasi permasalahan baik melalui Forum Perangkat Daerah maupun mekanisme lainnya, serta verifikasi maupun pendampingan penyempurnaan rancangan Renja oleh BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah. Penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud bertujuan untuk mempertajam program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2020 sebelum diajukan kepada Gubernur untuk mendapatkan pengesahan. Selanjutnya tahap akhir adalah Penetapan Renja.

Harapannya, keberhasilan pembangunan jangka pendek untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah tahun 2020 yaitu “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia”.

Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan dukungan, kesungguhan dan rasa tanggung jawab, etos kerja serta semangat gotong-royong seluruh aparatur di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, dan stakeholders serta pemangku kepentingan yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsi, kewenangan dan perannya dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dan ditetapkan.

